PERLINDUNGAN ANAK SEKOLAH SEBAGAI KONSUMEN JAJANAN DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN KONSUMEN

Nourma Dewi, Femmy Silaswaty
Dosen Universitas Islam Batik Surakarta
Email: Nourma_hukum92@yahoo.co.id

ABSTRAK

Pangan merupakan kebutuhan dasar dan hak asasi manusia yang harus terpenuhi. Pangan disini harus sesuai standar keamanan dan kesehatan. Salah satunya yang patut menjadi perhatian adalah mengenai keamanan pangan yang di konsumsi anak-anak di sekolah. Pendidikan kita bertujuan untuk mewujudkan peserta didik yang sehat. Anak usia sekolah biasanya tidak memperhatikan faktor kesehatan pangan. Mereka sebagai konsumen lebih tertarik pada makanan yang murah dan enak , dan menarik. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Berdasarkan penelitian disimpulkan Pemerintah sudah berusaha memenuhi hak anak sekolah sebagai konsumen melalui berbagai instrumen peraturan. Akan tetapi, peraturan itu tentunya dapat terlaksana dengan baik dengan dukungan pemerintah daerah, sekolah, dan masyarakat.

Kata kunci : Perlindungan, konsumen, anak sekolah, jajanan

ABSTRACT

Food is a basic need and human rights that must be fulfilled. Food here must comply with safety and health standards. One of the things that deserves attention is about food safety consumed by children in school. Our education aims to create healthy students. School-age children usually do not pay attention to food health factors. They as consumers are more interested in cheap and tasty, and interesting foods. This research is normative legal research. Based on the research it was concluded that the Government had tried to fulfill the rights of school children as consumers through various regulatory instruments. However, the regulation certainly can be carried out well with the support of local government, schools, and the community.

Keywords: Protection, consumers, school children, snacks

Latar Belakang

Pada umumnya anak-anak sekolah gemar membeli jajanan pedagang keliling yang berada di depan sekolah. Jajanan tersebut memang beraneka ragam dan terkadang lebih menarik dari bekal atau jajanan sehat yang khusus di sediakan kantin sekolah. Tak bisa dipungkiri produk jajanan yang mereka beli rasanya enak dan dijual dengan harga murah dimana sesuai dengan kemampuan uang saku yang mereka punya. Namun bagaimana dengan kebersihan, keamanan, dan kesehatan dari jajanan tersebut masih diragukan.

Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Pangan BPOM RI di seluruh Indonesia pada tahun 2008-2010 melakukan pengawasan terhadap PJAS (Pangan Jajanan Anak Sekolah) dan mendapatkan hasil bahwa 40-44% PJAS tidak memenuhi syarat karena makanan yang dijual mengandung bahan kimia berbahaya dan bahan tambahan pangan (BTP) seperti siklamat dan benzoat yang melebihi batas aman serta mengandung cemaran biologis (mikroba). Produk minuman es, minuman berwarna dan sirup, bakso, *jelly*/agar-agar adalah empat PJAS yang paling tidak memenuhi syarat keamanan.¹ Penelitian lainnya juga dilakukan oleh Badan POM. Dalam penelitian yang mengambil sampel jajanan di 30 Kota Indonesia dengan melibatkan 886 Sekolah Dasar (SD), menemukan bahwa 35 persen makanan jajanan tidak memenuhi syarat. Bahkan Tim Ahli Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), memaparkan beberapa zat berbahaya yang terkandung dalam jajanan anak sekolah. Zat-zat dimaksud seperti; formalin sebesar 27.3 persen *methanol yellow* (10,2%), *rhodamin* (10.9%) dan boraks hingga 56,7 persen. Angka ini sangat mengejutkan betapa berisikonya jika anak-anak mengonsumsi jajanan tersebut.²

Penelitian di atas menggambarkan kondisi yang cukup memprihatinkan kondisi jajanan yang dikonsumsi oleh anak sekolah. Selain itu, terdapat berbagai macam kasus anak sekolah keracunan jajanan sekolah, antara lain:

1. Sebanyak 22 orang siswa harus dilarikan ke sebuah Puskesmas di Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu, Senin , 4 Desember 2017. Puluhan siswa SD Sumuradem II tersebut keracunan jajanan sekolah.³
2. Sebanyak 33 siswa SDN 1 Muara, Kecamatan Suranenggala, Kabupaten Cirebon, diduga keracunan jajanan yang mereka beli di lingkungan sekolah.⁴

Dari kasus di atas, menggambarkan pelanggaran hak konsumen yang terdapat pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yaitu hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang dipakai serta artikel-artikel yang berhubungan dengan tulisan ini.

¹ Firstyariha Habibah.2017.Keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah, Tanggungjawab Siapa?. <https://www.kompasiana.com/firstyariha/59b945b1a1a50a41550707b2/keamanan-pangan-jajanan-anak-sekolah-tanggung-jawab-siapa>. Diakses 25 Februari 2018 pukul 07.14

² Rosita Eva.2014. Menyoal Jajanan Kaki Lima. <http://ylki.or.id/2014/02/menyoal-jajanan-kaki-lima/>. Diakses pada 25 Februari 2018 pukul 07.30

³ Gelar Gandarasa.2017. Puluhan Siswa SD Keracunan Setelah Jajan Makaroni Pedas. <http://www.pikiran-rakyat.com/jawa-barat/2017/12/04/puluhan-siswa-sd-keracunan-setelah-jajan-makaroni-pedas-415164>. Diakses 25 Februari Pukul 08.17

⁴ Lilis sri Handayani. 2017. 33 Siswa SD di Cirebon Diduga Keracunan Jajanan Sekolah. <http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/daerah/17/11/02/oysfyc409-33-siswa-sd-di-cirebon-diduga-keracunan-jajanan-sekolah>. Diakses pada 25 Februari 2018 pukul 08.33

PEMBAHASAN

A. Jajanan Sehat

Makanan jajanan adalah makanan dan minuman yang diolah oleh pengrajin makanan di tempat penjualan dan atau disajikan sebagai makanan siap santap untuk dijual bagi umum selain yang disajikan jasa boga, rumah makan/restoran, dan hotel. Sedangkan pengertian penanganan makanan jajanan adalah kegiatan yang meliputi pengadaan, penerimaan bahan makanan, pencucian, peracikan, pembuatan, pengubahan bentuk, pewadahan, penyimpanan, pengangkutan, penyajian makanan atau minuman.⁵

Makanan jajanan yang juga dikenal sebagai street foods adalah jenis makanan yang dijual di kaki lima, pinggir jalan, di stasiun, di pasar, tempat pemukiman, serta lokasi yang sejenis. Secara prinsip, pada umumnya makanan jajanan terbagi menjadi empat kelompok yaitu :⁶

1. Makanan utama atau main dish seperti bakso, mie ayam.
2. Panganan atau snack seperti makanan kemasan, kue-kue.
3. Minuman seperti berbagai macam es dan minuman kemasan.
4. Buah-buahan segar seperti mangga, melon.

Kita mengenal kehadiran makanan jajanan ini lebih dominan di sekolah. Bagi anak sekolah, makanan jajanan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kegiatan sehari-hari mereka. Makanan jajanan digunakan sebagai alternatif untuk memenuhi kebutuhan gizi anak sekolah karena keterbatasan waktu orang tua mengolah makanan di rumah. Selain murah makanan jajanan juga mudah didapat. Berdasarkan kondisi ini seharusnya makanan jajanan dapat dikelola menjadi produk sehat yang aman dikonsumsi. Makanan jajanan sehat adalah makanan yang memiliki ciri sebagai berikut:⁷

1. bebas dari lalat, semut, kecoa dan binatang lain yang dapat membawa kuman penyakit.
2. Bebas dari kotoran dan debu lain.
3. Makanan yang dikukus, direbus, atau digoreng menggunakan panas yang cukup artinya tidak setengah matang.
4. Disajikan dengan menggunakan alas yang bersih dan sudah dicuci lebih dahulu dengan air bersih.
5. Kecuali makanan jajanan yang di bungkus plastik atau daun, maka pengambilan makanan lain yang terbuka hendaklah dilakukan dengan menggunakan sendok, garpu atau alat lain yang bersih, jangan mengambil makanan dengan tangan.
6. Menggunakan makanan yang bersih, demikian pula lap kain yang digunakan untuk mengeringkan alat-alat itu supaya selalu bersih.

Anak sekolah sebagai konsumen utama adalah aset bangsa Indonesia untuk masa mendatang. Edukasi keamanan pangan menjadi salah satu upaya menerapkan perilaku keamanan pangan secara konsisten. Salah satunya adalah dengan diterapkannya

⁵ <http://www.dinkes.probolinggokota.go.id/index.php/6-syarat-jajanan-sekolah>, diakses pada 20 November 2018 Pukul 08.52

⁶ Loc.Cit

⁷ Loc.Cit

“5 kunci keamanan pangan untuk Anak Sekolah” yang berisi tips, pengetahuan dan prinsip mengenai praktek keamanan pangan anak sekolah, yaitu:⁸

1. Kunci 1, kenali pangan yang aman
2. Kunci 2, beli pangan yang aman. Misalnya membeli pangan di tempat yang bersih, membeli dari penjual yang sehat dan bersih, memilih pangan yang telah dimasak, memilih pangan yang dipajang, disimpan dan disajikan dengan baik, serta mengonsumsi pangan dengan benar.
3. Kunci 3, baca label dengan seksama. Label pangan adalah setiap keterangan mengenai pangan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada pangan, dimasukkan ke dalam, ditempel pada, atau merupakan bagian kemasan pangan.
4. Kunci 4, jaga kebersihan. Meskipun tidak semua mikroba dapat menyebabkan sakit, mikroba berbahaya/kuman banyak ditemukan pada tanah, air, hewan, dan manusia. Kuman dapat terbawa oleh udara atau melalui tangan, lap, dan peralatan makan sehingga perlu intervensi untuk mencegah terjadinya penyakit akibat pangan.
5. Kunci 5, Catat apa yang ditemui. Kunci ini menjelaskan tentang beberapa parameter yang perlu dilaporkan jika ditemui penyimpangan terhadap praktek keamanan pangan, baik di sekolah maupun di tempat lainnya dengan sistem E-notifikasi POM PI.

B. Perlindungan Anak Sekolah sebagai Konsumen Jajanan Sekolah Dalam Perspektif Perlindungan Konsumen

Anak sekolah sebagai konsumen jajanan ini perlu mendapat perhatian khusus dikarenakan usia mereka yang masih dibawah umur dimana faktor higienitas, kesehatan dan keamanan kurang diperhatikan oleh mereka sebagai konsumen. Disisi lain, pelaku usaha atau penjual makanan di area sekolah lebih memperhatikan bagaimana bisa menjual makanan yang menarik, murah dan mendapatkan untung yang banyak.

Melihat kejadian seperti keracunan makanan, hasil pemeriksaan dari BPOM RI dimana masih banyak jajanan anak sekolah yang mengandung bahan berbahaya, tentunya hal ini harus menjadi perhatian berbagai pihak baik orangtua, sekolah, dan pelaku usaha.

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa :

“Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Dari pengertian tersebut, tampak bahwa pembentuk Undang-Undang mengartikan secara luas mengenai perlindungan konsumen”.

Tujuan perlindungan konsumen adalah:

---

⁸ Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan RI. 2014. *Situasi Pangan Jajanan Anak Sekolah di Indonesia*. Hal.6

1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.
2. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan atau jasa.
3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.
4. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.
5. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha tentang pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.
6. Meningkatkan kualitas barang dan atau jasa, yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen.

Pengertian konsumen dalam Undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terdapat dalam Pasal 1 angka (2) yang menentukan bahwa konsumen yaitu setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Hak-hak konsumen terdapat dalam pasal 4 Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu :

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa.
2. Hak untuk memilih barang dan atau jasa serta mendapatkan barang dan atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
3. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan atau jasa yang digunakan.
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut
6. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen.
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menyatakan, kewajiban pelaku usaha adalah :

1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
2. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan;
3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
4. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
5. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
6. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai perjanjian.

Dari hak dan kewajiban antara pelaku usaha di atas, menggambarkan hubungan timbal balik yang saling berkaitan. Hak konsumen merupakan kewajiban pelaku usaha untuk memenuhinya.

Selain Undang-Undang Perlindungan konsumen tersebut, banyak peraturan lainnya yang mengatur mengenai kesehatan dan keamanan jajanan anak sekolah, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan

Undang-undang ini menegaskan pentingnya peraturan mengenai pangan yang merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan merupakan hak asasi bagi masyarakat Indonesia. Hal yang menjadi perhatian peraturan ini adalah penyelenggaraan keamanan pangan agar tidak mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan masyarakat. Pasal 68 Undang-Undang Pangan ini juga menyertakan peran pemerintah daerah untuk melaksanakan keamanan pangan.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan

Peraturan ini menegaskan pentingnya keamanan pangan, mutu pangan dengan mengatur mengenai bahan tambahan pangan, kemasan pangan, iradiasi pangan, sertifikasi pangan, industri rumah tangga.

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Dalam Pasal 79 menerangkan mengenai pentingnya kesehatan sekolah sehingga peserta didik dapat belajar dengan nyaman dan menjadi generasi yang berkualitas baik disekolah formal, informal, dan lembaga pendidikan. Selain itu, dalam Pasal 141 mengatur bahwa pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat

menjamin ketersediaan bahan pangan yang bergizi tinggi secara merata dan terjangkau.

4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Dalam undang-undang ini diatur bagaimana mewujudkan kesejahteraan anak terhadap pemenuhan hak-haknya salah satunya mengenai kesehatan anak. Pasal 4 mengatur mengenai tanggung jawab berbagai pihak seperti orangtua, keluarga, pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat untuk menjaga kesehatan anak. Pada anak usia sekolah, anak-anak belum terlalu mengerti dan paham mengenai pentingnya dan mengenali makanan dan minuman yang bersih, sehat, dan tidak membahayakan maupun merugikan kesehatan mereka sehingga perlu adanya peran berbagai pihak untuk mengawasi pangan yang dikonsumsi.

Peraturan-peraturan di atas menegaskan pentingnya terpenuhinya hak anak untuk mendapatkan pangan yang sehat, aman, dan bergizi. Untuk mewujudkannya, perlu dukungan dari pemerintah, pemerintah daerah, sekolah, orang tua, dan masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa pendidikan berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak peserta didik agar menjadi manusia yang berakhlak mulia, sehat, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Peraturan tersebut memperlihatkan salah satu tujuan pendidikan menjadikan peserta didik yang sehat. Sehat dalam penelitian ini adalah sehat jasmani yang tentunya juga dipengaruhi oleh konsumsi pangan di sekolah. Pasal 42 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan mengatur mengenai setiap satuan pendidikan wajib memiliki ruang kantin. Selain itu, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 57 Tahun 2009 Tentang Pemberian Bantuan Pengembangan Sekolah Sehat dimana memperhatikan penataan sarana prasarana kantin sekolah yang sehat.

Badan Pengelola Obat dan Makanan (BPOM) menetapkan peraturan kantin sehat di sekolah. Pertama, kantin sehat harus memiliki makanan yang higienis. Kedua, perhatikan warna dan makanan pada minuman. Pasalnya, jika makanan dan minuman dengan warna yang mencolok menggunakan bahan makanan yang tidak sehat. Ketiga, perhatikan tekstur atau bentuk makanan. Keempat, perhatikan cek label kemasan sebelum membeli. Kelima, agar kesehatan dan kebersihan semakin terjaga, BPOM juga menganjurkan setiap sekolah memiliki tempat cuci tangan.

Pemerintah memberi perhatian khusus mengenai jaminan kesehatan anak sekolah sebagai konsumen dengan berbagai instrumen peraturan di atas. Akan tetapi, Pada umumnya jajanan/makanan yang dijual di sekolah adalah makanan industri rumahan atau produk olahan mandiri yang tidak hanya dijual melalui kantin sekolah tetapi juga di depan sekolah yang bisa saja tercemar mikroba,

bahan tambahan pangan yang berbahaya, dan tempat serta penjual yang tidak sesuai dengan standar keamanan dan kesehatan pangan.

SIMPULAN

Pemerintah sudah memberikan perhatian khusus mengenai perlindungan anak sekolah sebagai konsumen jajanan sekolah dengan berbagai instrumen peraturan yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 57 Tahun 2009 Tentang Pemberian Bantuan Pengembangan Sekolah Sehat, dan Undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen . Akan tetapi, masih banyak pelaku usaha yang berjualan di kantin atau di depan sekolah yang tidak sesuai standar keamanan dan kesehatan pangan. Diperlukan keterlibatan berbagai pihak terutama pemerintah daerah, sekolah, masyarakat untuk mewujudkan keamanan dan kesehatan pangan. Adanya peran serta orangtua untuk mendidik anaknya untuk membeli jajanan yang sehat dengan tidak membiarkan anaknya membeli jajanan di luar sekolah yang tidak higienis atau tidak terjamin keamanannya. Adanya kebijakan dari sekolah untuk turut serta soal ijin berjualan untuk penjual yang berjualan di depan sekolah.

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 57 Tahun 2009 Tentang Pemberian
Bantuan Pengembangan Sekolah Sehat
Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan RI. 2014. *Situasi Pangan Jajanan
Anak Sekolah di Indonesia*.
Firstyarikha Habibah.2017.Keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah, Tanggungjawab
Siapa?.
[https://www.kompasiana.com/firstyarikha/59b945b1a1a50a41550707b2/keamana
n-pangan-jajanan-anak-sekolah-tanggung-jawab-siapa](https://www.kompasiana.com/firstyarikha/59b945b1a1a50a41550707b2/keamana-n-pangan-jajanan-anak-sekolah-tanggung-jawab-siapa). Diakses 25 Februari 2018
pukul 07.14

- Rosita Eva.2014. Menyoal Jajanan Kaki Lima. <http://ylki.or.id/2014/02/menyoal-jajanan-kaki-lima/>. Diakses pada 25 Februari 2018 pukul 07.30
- Gelar Gandarasa.2017. Puluhan Siswa SD Keracunan Setelah Jajan Makaroni Pedas. <http://www.pikiran-rakyat.com/jawa-barat/2017/12/04/puluhan-siswa-sd-keracunan-setelah-jajan-makaroni-pedas-415164>. Diakses 25 Februari Pukul 08.17
- Lilis sri Handayani. 2017. 33 Siswa SD di Cirebon Diduga Keracunan Jajanan Sekolah. <http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/daerah/17/11/02/oysfyc409-33-siswa-sd-di-cirebon-diduga-keracunan-jajanan-sekolah>. Diakses pada 25 Februari 2018 pukul 08.33
- <http://www.dinkes.probolinggokota.go.id/index.php/6-syarat-jajanan-sekolah>, diakses pada 20 November 2018 Pukul 08.52